



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUYANTO, SH, MH
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. NURHIDAYAH, SH, MH
Jabatan : Bupati Kotawaringin Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalan Bun, 15 November 2018

Pihak Kedua,


BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Hj. NURHIDAYAH, SH, MH

Pihak Pertama,

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,


SEKRETARIS DAERAH
SUANTO, SH, MH
19640418 199203 1 009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	- Nilai SAKIP Kabupaten	B
2	Meningkatnya informasi dan kualitas layanan pengadaan secara elektronik	- Capaian Standar Pelayanan pengelolaan LPSE	71%
3	Meningkatnya kapasitas pelayanan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	- Capaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	100%
4	Meningkatnya dokumentasi dan informasi hukum di Kab. Ktw. Barat yang dapat diakses oleh masyarakat	- Tingkat kepuasan publik terhadap layanan dokumentasi dan informasi hukum	C
5	Terpublikasikan dan terdokumentasikannya kegiatan Pemerintah Daerah dengan baik	- Persentase tersebarnya informasi kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat	80%
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kabupaten	- Rata-rata Angka/ Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat SKPD	65
7	Terselenggaranya pemerintahan desa yang baik	- Persentase jumlah desa yang memiliki tata kelola pemerintahan desa dengan baik	70%
8	Meningkatnya Pengendalian perekonomian dan SDA	- Persentase hasil monev bid perekonomian & SDA yang ditindaklanjuti	76.19%
9	Meningkatnya pelayanan di bidang keagamaan dan kemasyarakatan	- persentase pelayanan dan fasilitasi bidang keagamaan	40%

Program		Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Pembinaan Kemasyarakatan	223,430,000.00	APBD
2	Program Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	60,000,000.00	APBD
3	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	148,000,000.00	APBD
4	Program Penyebaran Informasi dan Dokumentasi	2,149,649,500.00	APBD
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	49,915,000.00	APBD
6	Program Peningkatan Kehidupan Beragama	1,854,369,800.00	APBD
7	Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengalaman, dan Pengembangan Nilai-nilai Keagamaan	3,347,689,200.00	APBD
8	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	46,856,200.00	APBD
9	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	26,992,000.00	APBD
10	Program Pengawasan dan Penerbitan Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	59,528,800.00	APBD

11	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	1,754,515,000.00	APBD
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	13,893,678,060.00	APBD
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11,111,984,800.00	APBD
14	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	356,500,000.00	APBD
15	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	325,500,000.00	APBD
16	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	31,700,000.00	APBD
17	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	2,278,288,140.00	APBD
18	Program Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	96,300,200.00	APBD
19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	473,913,400.00	APBD
20	Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum	537,700,000.00	APBD
21	Program Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia (RANHAM)	68,400,000.00	APBD
22	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	260,812,000.00	APBD
23	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	168,000,000.00	APBD
24	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	359,358,000.00	APBD
25	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	108,550,000.00	APBD
26	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan	73,000,000.00	APBD
27	Program Penyusunan Kebijakan dan Administrasi Pembangunan	351,380,500.00	APBD

28	Program Pengembangan Data/Informasi Bidang Pengadaan	194,203,400.00	APBD
29	Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	807,310,000.00	APBD
Total Anggaran		41,217,524,000.00	



Bupati Kotawaringin Barat,

H. NURHIDAYAH, SH, MH

Pangkalan Bun, 15 November 2018



Sekretaris Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat,

SUYANTO, SH, MH

NIP. 19640418 199203 1 009